

IMPLEMENTASI PROGRAM DIGITALISASI PADA KANTOR DESA SADANG KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

(Studi Kasus 2020-2022)

Yunita Dewi Nurkumala

NPP. 30.0867

Asdaf Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Kebijakan Publik

Email: yunitadewi1609@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Dra. Roslianah, M.Pd

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The digitization program at the Sadang Village Office, Jatirogo District, Tuban Regency, East Java Province in its implementation has not run optimally. This is because there are obstacles in administrative services, development activities, and budget transparency. Purpose:* *Therefore, this research aims to analyze and describe the implementation of the digitalization program at the Sadang Village Office, Jatirogo District, Tuban Regency, East Java Province. Method:* *The research method used in this study is qualitative descriptive. The number of informants in this study was 10 people. Data collection using observation, interview, and documentation techniques. The source of data in this study is from primary data and secondary data. The data analysis is through data reduction, data presentation, and data verification. The theory used in this study is the theory initiated by Marilee S. Grindle which states there are 2 major variables, namely the content of policy and the implementation environment.*

Result: *The results of this study show that the implementation of the digitalization program at the Sadang Village Office, Jatirogo District, Tuban Regency, East Java Province has gone quite well, this can be seen from community satisfaction with the services provided by the Sadang village apparatus. Conclusion:* *The village digitalization program at the Sadang Village office, Jatirogo District, Tuban Regency, East Java Province can help increase the income of the local community, because with the village digitalization program, the people of Sadang Village can develop micro, small, and medium enterprises easily through free internet network facilities that are well realized in this village digitalization program.*

Keywords : *Digitalization Program, Policy Implementation*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Program digitalisasi pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dalam penerapannya belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan terdapat hambatan dalam pelayanan administrasi, kegiatan pembangunan, maupun transparansi anggaran. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program digitalisasi pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini yaitu dari data primer dan data sekunder. Adapun analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori yang dicetuskan oleh Marilee S. Grindle yang menyatakan terdapat 2 variabel besar yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

Hasil/Temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program digitalisasi pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sudah berjalan cukup baik, hal ini dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan perangkat desa Sadang. **Kesimpulan:** Program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, karena dengan adanya program digitalisasi desa, masyarakat Desa Sadang dapat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mudah melalui fasilitas jaringan internet gratis yang terealisasi dengan baik pada program digitalisasi desa ini.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Program Digitalisasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat desa yang semula menjadi objek pembangunan bagi pemerintahan daerah kini sebagai subjek pembangunan yang diberikan hak untuk menentukan sendiri arah pembangunan desanya melalui pendapatan yang diperoleh desa itu sendiri. Perubahan pandangan tentang desa ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektifitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut pemerintah desa harus mampu berinovasi dalam mengelola pemerintahan desanya. Salah satu inovasi yang bisa dilakukan oleh pemerintahan desa adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam melaksanakan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini disebabkan teknologi informasi dan komunikasi kini dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan masyarakat desa dan memiliki pengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini (Beriansyah *et al.*, 2021:6).

Konsep desa digital ini diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai salah satu penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yakni terkait pemberdayaan masyarakat dan Desa serta guna mewujudkan pelaksanaan visi misi Kabupaten Tuban, yaitu memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif. Tujuan dari program digitalisasi desa ini untuk mendukung perencanaan pembangunan desa, mendukung pelaksanaan pembangunan desa, monitoring, pengawasan dan evaluasi pembangunan desa. Digitalisasi desa juga dapat digunakan untuk pengembangan potensi unggulan desa melalui pendataan potensi unggulan oleh pemerintah desa yang kemudian dipromosikan pemerintah desa secara online. Digitalisasi desa ini pula bertujuan untuk peningkatan transparansi keuangan dan kegiatan pembangunan desa baik lokus, biaya, jumlah kegiatan, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan hal pelayanan digitalisasi desa ini bertujuan untuk mempercepat layanan pemerintah desa secara efektif dan efisien kepada warga desa, contohnya pembuatan surat kelahiran, surat keterangan, surat kematian, maupun administrasi lain yang diperlukan oleh masyarakat desa. Implementasi program digitalisasi desa ini di 311 desa dan 17 kelurahan yang ada di 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban yang salah satunya berada di Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo. Sebagaimana konsep desa digital yang diadopsi pemerintah Kabupaten Tuban ini didasari dari adopsi teknologi informasi untuk mengintegrasikan potensi dan sistem kelembagaan desa, agar menghasilkan manfaat bagi masyarakat pedesaan (Village, 2020). Melalui konsep desa digital diharapkan dapat menciptakan desa pintar yang memanfaatkan teknologi sebagai katalisator pembangunan, pendidikan, peluang bisnis lokal, peningkatan dan kesejahteraan seluruh penduduk pedesaan (Ranade *et al.*, 2015:6).

Alasan dipilihnya Desa Sadang dalam penerapan program digitalisasi desa ini, karena Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten, karena ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan program digitalisasi desa di Desa Sadang Kecamatan Jatirogo.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penerapan program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, meskipun dalam bidang pemberdayaan program digitalisasi desa mampu mendorong perekonomian masyarakat, namun dibidang lain seperti di bidang pelayanan administrasi melalui aplikasi SEPASI sudah berjalan, namun belum optimal hal ini terbukti masyarakat masih mengeluhkan lambatnya pelayanan administrasi seperti pembuatan surat, kemudian pada kegiatan pembangunan masih terlihat sarana prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak menjadi prioritas hal ini dibuktikan berdasarkan hasil musrenbangdes , selanjutnya transparansi anggaran terlihat belum berjalan karena tidak dilibatkannya lembaga yang ada di desa dalam musrenbang desa. Hal ini sejalan dengan data Pemerintah Desa Sadang terkait data fasilitas digitalisasi desa yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks implementasi program maupun konteks digitalisasi desa.

Penelitian Harry Muhammad Badri berjudul *Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Badri,2016), memiliki tujuan untuk mengetahui masalah dan strategi pembangunan TIK di pedesaan dan membahas tentang Gerakan Desa Membangun. Penelitian oleh Didit Praditya yang berjudul *Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Tingkat Pemerintahan Desa* (Praditya, 2014), berfokus pada pemanfaatan TIK di tingkat desa. Penggunaan pemanfaatan TIK dalam penelitian ini diartikan sebagai penggunaan/pemanfaatan TIK oleh desa untuk mendukung kegiatan pemerintah desa terkait pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan TIK di tingkat desa melalui studi di salah satu desa di Jawa Barat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang membahas tentang penerapan TIK untuk meningkatkan digitalisasi pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian Z Abdussamad yang berjudul *Development of Digital Village in Improving Public Services in Lamahu Village of Bone Bolango Regency* (Abdussamad, 2021), penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan tentang Perkembangan desa digital dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Lamahu yang terdiri dari Penerapan sistem pelayanan pemerintah dengan e-Government, Pelayanan masyarakat pada aspek kesehatan dan keamanan berbasis android, dan Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu juga menjelaskan faktor penentu yang menentukan keberhasilan pembangunan desa digital di Desa Lamahu, diantaranya adalah Tingkat pendidikan publik, Tersedianya akses teknologi informasi, dan ada dukungan dan komitmen dari pemerintah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni membahas tentang penerapan program digitalisasi pada kantor desa, metodenya yang digunakan menggunakan metode kualitatif juga berbeda dengan penelitian Badri, Praditya, maupun Abdussamad. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan

juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Kedua variable tersebut terdiri dari sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* terkandung dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang didapat oleh *target group*, sejauhmana perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan, apakah tempat sebuah program sudah tepat, apakah suatu kebijakan telah menuturkan pembuat kebijakan dengan rinci, dan apakah program yang dibuat didukung dengan sumber daya yang optimal.

1.5. Tujuan.

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan menganalisis implementasi program digitalisasi pada kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Atas dasar kajian tersebut diharapkan dapat ditemukan strategi pengembangan program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan masyarakat Desa Sadang.

II. METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif adalah untuk memberikan gambaran yang faktual dan akurat serta membuat deskripsi secara spesifik dan sistematis mengenai fenomena yang akan diteliti yakni terkait sejauh mana penerapan program digitalisasi pada Kantor Desa Sadang. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan metode deskriptif yang merupakan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti karena kesesuaian metode tersebut dengan penelitian ini. Pendekatan ini peneliti gunakan dalam pelaksanaan kegiatan magang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yaitu mengenai Implementasi Program Digitalisasi Pada Kantor Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur yang diuraikan dalam bentuk gambaran penulisan.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Menurut Sugiyono (2019:289) *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan yang dipilih merupakan mereka yang ahli dan memahami tentang objek penelitian yang dibahas sehingga mampu menghadirkan informasi atau data yang lengkap Adapun informan pada penelitian ini terdiri dari kepala desa Sadang (kades), sekretaris desa, kepala dusun, kepala urusan tu&umum, kepala urusan perencanaan, dan masyarakat penerima layanan masing-masing 10 orang. Adapun analisisnya menggunakan teori keberhasilan implementasi yang digagas oleh Grindle Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011:93) dipengaruhi oleh dua variable besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi program digitalisasi pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur menggunakan pendapat dari Grindle yang

menyatakan bahwa dalam implementasi terdiri dari 2 variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Kepentingan yang memengaruhi kebijakan, Jenis manfaat yang akan dihasilkan, Derajat perubahan yang diinginkan, Kedudukan pembuat kebijakan, Pelaksana program. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan penguasa, Kepatuhan dan daya tanggap, Sumber daya yang dikerahkan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut

3.1. Kepentingan yang Memengaruhi Kebijakan

Penulis melakukan observasi dan wawancara terhadap peran pimpinan dalam memberikan arahan, mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah dalam implementasi program digitalisasi pada kantor Desa Sadang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Sadang mengatakan “Masalah persiapan sudah cukup baik, sejauh ini penyediaan sarana sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik melalui mulut ke mulut, karena pihak Desa hanya menyampaikan melalui musrenbangdes”. Lebih lanjut lagi Sekretaris Desa Sadang mengatakan “Sejauh ini langkah-langkah yang dilakukan perangkat desa dalam menerapkan digitalisasi desa kepada masyarakat Desa Sadang yakni menyebarluaskan melalui rembung desa sebelum giat musrenbangdes, untuk sosialisasi khusus memang belum ada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan persiapan pengembangan *e-Government* Kabupaten Tuban merupakan salah satu dari kepentingan yang memengaruhi pimplementasi program digitalisasi desa pada Kantor Desa Sadang Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Kepentingan yang memengaruhi termasuk dalam dimensi isi kebijakan (*content of policy*) yang dikemukakan Grindle dalam teorinya. Menurut Grindle, kepentingan yang memengaruhi berpendapat bahwa suatu kebijakan melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasi kebijakan, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap persiapan pengembangan *e-Government* Kabupaten Tuban untuk mewujudkan program digitalisasi Desa Sadang belum cukup matang sebagaimana dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pengembangan *e-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban untuk tahap persiapan perlu adanya sosialisasi situs web untuk internal dan publik Pemerintah Kabupaten Tuban, karena situs ini telah menjadi salah satu media informasi OPD dan Kantor kepada masyarakat.

3.2. Tipe Manfaat yang Diperoleh

Penulis melakukan pengukuran terhadap tujuan dari implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Terkait indikator apakah tujuan program digitalisasi desa pada implementasi program digitalisasi pada kantor Desa Sadang. Dalam hasil wawancara kami dengan Kepala Desa Sadang mengatakan bahwa “Sejauh ini manfaat yang diperoleh dari digitalisasi desa ini masyarakat merasakan mudahnya mempromosikan produk lokal, seperti camilan marning yang merupakan salah satu UMKM kuliner yang berkembang di Desa Sadang, hal ini tentunya mendorong pemberdayaan masyarakat di bidang UMKM. Bukan hanya itu masyarakat juga bisa menikmati akses wifi gratis

yang sudah saya jelaskan tadi, wifi ini dapat digunakan untuk menunjang pendidikan maupun layanan pengaduan masyarakat secara online melalui *website* desa.” Wawancara diatas menunjukkan menyatakan bahwa dengan adanya program digitalisasi desa pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dapat mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya dibidang UMKM kuliner serta dapat memudahkan warga Desa Sadang untuk mengakses internet secara gratis baik digunakan untuk pendidikan, pengaduan, maupun hal lainnya.

Berdasarkan observasi di lapangan, penulis menemukan terkait manfaat yang diperoleh adanya program digitalisasi desa. Masyarakat yang menjadi objek penerapan program digitalisasi ini merasakan adanya kemudahan untuk mengakses internet. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undang sebagai landasan hukumnya memang harus dapat membuahkan hasil yang dapat bermanfaat dan memiliki dampak positif serta dapat merubah ke arah yang lebih baik dari hasil penerapannya.

Pada poin ini *Content of Policy* isi kebijakan menurut Merilee S. Grindle berupaya untuk menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh penerapan kepada khalayak pelaku lebih mudah di implementasikan dibanding dengan kebijakan yang kurang bermanfaat.

3.3. Derajat Perubahan yang Diinginkan

Penulis melakukan pengukuran terhadap ketepatan dan kesesuaian tujuan program digitalisasi desa dari implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Dalam indikator ketepatan dan kesesuaian tujuan program digitalisasi desa memuat pertanyaan yaitu “apakah program digitalisasi pada kantor Desa Sadang sudah tepat dan sesuai dengan tujuannya?” dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sadang menerangkan bahwa “menurut saya sejauh ini penerapan program digitalisasi desa sudah cukup sesuai dengan tujuan program ini yaitu untuk memberikan layanan maupun memberdayakan masyarakat, seperti yang kita ketahui adanya fasilitas wifi desa yang didapat masyarakat dan juga adanya lapangan pekerjaan yang terbuka seperti pembangunan Pasar Wisata Kuliner yang dapat memberdayakan masyarakat.” Dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan Perencanaan Desa Sadang menyatakan jika manfaat program digitalisasi sudah sesuai dengan tujuan dilahirkan program ini yakni untuk memberikan pelayanan, memberdayakan masyarakat dan pembangunan. Selanjutnya Kepala Seksi menjelaskan bahwa “Sejauh ini tujuan program digitalisasi desa sudah sesuai dengan rpjmdes mbak untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Sadang khususnya”. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menerangkan bahwa tujuan dari program digitalisasi sudah sesuai dengan rpjmdes (rencana pembangunan jangka menengah desa) Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

Program digitalisasi desa menginginkan perubahan yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, mendorong perencanaan pembangunan, dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Merilee S. Grindle, indikator derajat perubahan yang diinginkan menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Sebuah kebijakan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

berkelanjutan. Suatu implementasi yang baik akan memberikan *output* yang baik pula dalam jangka waktu yang singkat maupun berkelanjutan.

3.4. Letak Pengambilan Keputusan

Penulis melakukan pengukuran terhadap keikutsertaan pimpinan dalam implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Dalam dimensi letak pengambilan keputusan memuat satu pertanyaan yaitu “bagaimana keikutsertaan pimpinan dalam implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang?” dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sadang menyatakan bahwa “Sebagai kepala desa tentunya selalu melakukan pengawasan dalam segala kegiatan termasuk bagaimana penerapan program digitalisasi ini, bukan hanya pengawasan internal tetapi juga pengawasan eksternal dari inspektorat maupun diskominfo kabupaten” Dari hasil wawancara tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa kepala desa melakukan pengawasan secara internal maupun eksternal.

Untuk menggali informasi lebih dalam peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sadang menyatakan bahwa “Pengawasan yang dilakukan dalam program ini secara internal antar pegawai dan juga eksternal oleh diskominfo”. Berdasarkan hasil wawancara tersebut informan 3 menjelaskan bahwa dalam implementasi program digitalisasi pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur dilakukan suatu pengawasan baik secara internal antar pegawai maupun eksternal dengan dinas komunikasi dan informatika.

3.5. Pelaksana Program

Penulis melakukan pengukuran terhadap kesesuaian SOP program digitalisasi desa dalam implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk melaksanakan program digitalisasi desa. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pertanggung jawabannya maka dibentuk operator khusus yang mengelola program digitalisasi desa.

Guna memastikan hasil observasi tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa “Sejauh ini untuk standar operasional prosedur secara khusus belum ada, kami berpatokan pada regulasi yang mengatur *e-Government* di lingkup Pemerintah Kabupaten Tuban” Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa standar operasional prosedur dalam implementasi program digitalisasi pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur belum ada, sejauh ini pemerintah desa berpedoman pada peraturan tentang *e-Government* di lingkup Pemerintahan Kabupaten Tuban.

Menurut teori Merile Grindle menyatakan bahwa pelaksana program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena pelaksana program adalah penegak ataupun alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para pelaksana ini adalah penyedia dan yang pemberi pelayanan bagi masyarakat didalam suatu kebijakan.

3.6. Sumber Daya yang Dikerahkan

Penulis melakukan pengukuran terhadap konsistensi dan rasa tanggung jawab pegawai, kompetensi dan keahlian pegawai dan kondisi sarana dan prasana dari program digitalisasi desa dalam implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa, sumber daya manusia di Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban sudah baik dalam melakukan tugas dan fungsi, terutama dalam melaksanakan governansi digital, salah satunya penerapan program digitalisasi desa pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Guna memastikan hasil observasi kemudian penulis melakukan wawancara dengan Kepala Urusan TU dan Umum terkait pengadaan, pemeliharaan dan standar sarana yang digunakan untuk mendorong implementasi program digitalisasi desa, menyatakan bahwa “Perihal pemeliharaan setiap tahun kita anggarkan anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana desa.” Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Sadang disampaikan bahwa setiap tahun terdapat anggaran khusus untuk pemeliharaan sarana dan prasarana desa.

Dalam pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk menyukkseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sebagaimana menurut teori yang dikemukakan Merilee S. Grindle sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif, dan efisien.

3.7. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Penulis melakukan pengukuran terhadap gaya kepemimpinan, sosialisasi program, dan koordinasi serta kerjasama dalam implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Hasil observasi peneliti dilapangan, kurang disiplinnya sebagian oknum perangkat desa yang mana jarang terlihat dikantornya. Ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sosialisasi terhadap masyarakat yang masih kurang.

Guna memastikan observasi tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sadang menyatakan bahwa “Sampai saat ini memang belum ada pendekatan khusus maupun sosialisasi khusus untuk penerapan program digitalisasi, paling cuman lewat musrenbangdes”. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dusun Desa Sadang disampaikan bahwa belum terdapat sosialisasi khusus terkait implementasi program digitalisasi pada kantor desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, sosialisasi dilakukan melalui musrenbangdes. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan masyarakat penerima layanan, mengatakan bahwa “Waktu musrenbangdes sudah disampaikan bahwa ada program digitalisasi ini, masyarakat bisa mengurus surat dengan mudah.” Dari hasil wawancara dengan informan 10 disampaikan bahwa adanya program digitalisasi dapat membantu masyarakat mengurus surat dengan mudah, hal ini diketahui ketika informan 10 mengikuti musrenbangdes.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti mengatakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan para pelaksana dari program digitalisasi desa. Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat dan perangkat mengenai sosialisasi program digitalisasi desa. Padahal menurut teori yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle pada indikator kekuasaan,

kepentingan-kepentingan dan strategi aktor bertujuan untuk memperlancar jalannya pelaksanaan suatu kebijakan, pada hal ini melihat dari sosialisasi program digitalisasi desa.

3.8. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Penulis melakukan pengukuran terhadap perilaku pegawai dalam pemberian layanan terkait implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Perangkat Desa Sadang bersikap ramah kepada masyarakat yang datang langsung ke kantor desa. Guna memastikan hasil observasi peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat penerima layanan, berikut hasil wawancara masyarakat penerima layanan, mengatakan “Pelayanan ke balai desa, perangkat desanya dalam menanggapi masyarakat sangatlah ramah” Dari hasil wawancara dengan masyarakat penerima layanan diketahui bahwa dalam memberikan pelayanan dan memberikan tanggapan kepada masyarakat, perangkat desa Sadang bersikap ramah.

Pada indikator karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa menurut teori Grindle karakteristik dari lembaga yang akan sangat memengaruhi implementasi suatu kebijakan, begitupun karakter perangkat desa pada implementasi program digitalisasi pada kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur ini sudah cukup baik sesuai dengan apa yang telah dikemukakan Merilee S. Grindle.

3.9. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Penulis melakukan pengukuran terhadap tingkat kepatuhan masyarakat dan respon masyarakat terkait program digitalisasi desa dalam implementasi program digitalisasi desa pada kantor Desa Sadang.

Berdasarkan hasil wawancara terkait kepatuhan para pelaksana program digitalisasi desa, dengan Kepala Desa Sadang, mengatakan “Teruntuk pemahaman masyarakat terkait program digitalisasi ini sudah baik, masyarakat telah memanfaatkan fasilitas internet gratis untuk mempromosikan jualan maupun untuk edukasi, meskipun dalam hal administrasi masih terdapat masyarakat yang memilih mengurus surat secara manual, datang langsung ke kantor desa.” Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa disampaikan bahwa pemahaman masyarakat dalam program digitalisasi desa sudah baik, hal ini terbukti masyarakat memanfaatkan fasilitas internet gratis untuk mendorong pengembangan UMKM masyarakat Desa Sadang dan juga untuk mendorong pendidikan masyarakat Desa Sadang, meskipun dalam hal administrasi masih terdapat masyarakat yang memilih mengurus secara manual langsung datang ke Kantor Desa Sadang, seperti pembuatan surat. Sehubungan dengan kepatuhan dan respon dari pelaksana program digitalisasi, masyarakat penerima layanan mengatakan “Saya tahu program digitalisasi dari orang-orang katanya ada wifi gratis dan bisa buat surat di rumah aja” Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat penerima layanan menyatakan bahwa sejauh ini yang diketahui dari adanya program digitalisasi desa adalah terdapat fasilitas berupa jaringan internet gratis yang dapat digunakan untuk mempromosikan umkm yang sedang dikembangkan.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, peneliti melihat bagaimana respon dari para pelaksana implementasi program digitalisasi desa pada Kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten

Tuban, Provinsi Jawa Timur yang sangat responsif dalam memberikan pelayanan. Sebagaimana yang dalam teori Grindle menyatakan bahwa hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana.

3.10. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi program digitalisasi pada kantor Desa Sadang memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka membangun masyarakat digital. Program digitalisasi desa merupakan salah satu sarana pengembangan dari pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni masyarakat berpartisipasi dengan cukup baik dikarenakan adanya pelayanan yang baik dari pemerintah setempat. Sama halnya dengan temuan (Badri, 2016) bahwa strategi pengembangan TIK dapat meningkatkan pelayanan di pedesaan, masyarakat Desa Sadang merupakan kunci berjalannya program digitalisasi desa pada Kantor Desa Sadang.

Layaknya program lainnya, program digitalisasi desa ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah Kurangnya sumber daya modal untuk mengembangkan program digitalisasi Kurangnya sosialisasi terkait implementasi program digitalisasi pada kantor Kurangnya tenaga ahli untuk mengembangkan program digitalisasi desa, layaknya temuan (Praditya, 2014).

Adanya program ini juga diharapkan secara jangka panjang mampu meningkatkan pelayanan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat, sehingga mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat secara tidak langsung layaknya penelitian Abdussamad yang menemukan sistem pelayanan pemerintah dengan e-Government, Pelayanan masyarakat pada aspek kesehatan dan keamanan berbasis android, dan pemberdayaan masyarakat (Abdussamad, 2021).

IV. KESIMPULAN

Menurut teori implementasi yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle pada implementasi program digitalisasi pada kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sudah cukup berhasil, meskipun terdapat beberapa kendala. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya beberapa kelompok dimensi dari isi kebijakan dan lingkungan kebijakan, berikut rincian *outcome* dari implementasi program digitalisasi pada kantor Desa Sadang, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur :

- a. Dalam hal sosialisasi peran kepala desa belum optimal
- b. Memudahkan dalam hal pelayanan administrasi
- c. Mendorong berkembangnya UMKM
- d. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
- e. Terdapat fasilitas jaringan internet gratis
- f. Koordinasi terjalin dengan mudah melalui media sosial
- g. Sumber daya aparatur yang mengelola sudah mumpuni, namun hanya ada satu orang
- h. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Sadang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Development Of Digital Village In Improving Public Services In Lamahu Village Of Bone Bolango Regency*. 6(10), 221–224.

Beriansyah, A., M. Wahid dan Hartati. 2021. "Pendampingan Pengembangan Desa Digital melalui Komunitas Pemuda di Desa Pematang Jering Kabupaten Muaro Jambi", RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2, Medan: Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dharmawangsa.

Badri, M, 2016. "Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi pada Gerakan Desa Membangun)", Jurnal Dakwah Risalah Vol. 27, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Praditya, D. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Tingkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 17(2), 129–140. <https://doi.org/10.20422/jpk.v17i2.12>

Ranade, P., Londhe, S., & Mishra, A. (2015). Smart Villages Through Information Technology – Need Of Emerging India. *International Journal Of Information Technology (IJIT)*, 3(7), 1–6. https://www.researchgate.net/publication/280613118%0A%0Ahttp://www.ipasj.org/IJIT/IJIT.Htm%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Pinak_Ranade/publication/280613118_SMART_VILLAGES_THROUGH_INFORMATION_TECHNOLOGY_-_NEED_OF_EMERGING_INDIA/links/55beedf008a

Subarsono, AG. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R& D*. Alfabeta

Village, B. (2020). *Study And Development Of Tillor Buzurg Village As A Smart Village*. 7(6). https://www.researchgate.net/profile/Megharima-Datta/publication/340315742_STUDY_AND_DEVELOPMENT_OF_TILLOR_BUZURG_VILLAGE_AS_A_SMART_VILLAGE/links/5e83b77492851c2f5270d8b0/STUDY-AND-DEVELOPMENT-OF-TILLOR-BUZURG-VILLAGE-AS-A-SMART-VILLAGE.Pdf